

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DERISTA RIZKYANI

NPM: 1551010024

Jurusan : Ekonomi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2020 M

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
DERISTA RIZKYANI
NPM: 1551010024
Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Budimansyah, S.Th., M.Kom.I.

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2020 M

ABSTRAK

Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera berada di urutan ke empat lebih kecil dari wilayah yang lain yaitu sebesar 10,39 persen, tetapi memiliki peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu ada 5,9 juta penduduknya berada dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di pulau Sumatera masih tergolong besar karna masih banyak beberapa provinsi di pulau sumatera yang memiliki persentase tingkat kemiskinan tergolong tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh IPM, pengangguran, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan secara simultan dan parsial Provinsi di pulau Sumatera dan bagaimana kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera secara parsial, untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera secara simultan dan untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara kuantitatif dan skala pengukuran variabel menggunakan skala rasio. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia(X1), pengangguran (X2) dan PDRB (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat kemiskinan (Y) dengan objek penelitian 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor tersebut menggunakan regresi data panel dan teknik sampel yang digunakan purposive sampling dengan data *time series*, jumlah sampel 8 tahun yakni tahun 2011-2018. Secara keseluruhan hasil penelitian ini secara simultan (Uji F) Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018, Secara parsial (Uji T) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018, pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di pulau Sumatera tahun 2011-2018, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018. Dalam perspektif ekonomi Islam kemiskinan sangat tidak dianjurkan, Islam mengecam kemiskinan namun juga sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup berkucukupan karna kemiskinan dapat membahayakan akhlak, pemikiran, keluarga dan kefakiran dapat mendekatkan pada kekufuran. Maka sebagai seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri karena dalam Islam setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin).

Kata Kunci : *IPM, Pengangguran, PDRB, dan Tingkat Kemiskinan*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Derista Rizkyani

NPM : 1551010024

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Provinsi di pulau Sumatera Tahun 2011-2018)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 5 November 2019
Penyusun,

Derista Rizkyani
NPM.1551010024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703160

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Provinsi di pulau
Sumatera Tahun 2011-2018)**

Nama
NPM
Prodi
Fakultas

Derista Rizkyani
1551010024
Ekonomi Syariah
Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Budimansyah, S.Th., M.Kom.I

Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek

NIP. 197707252002121001

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.SI

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Lat. Kol. H. Endro Suratmim, Sukarami, Bandar, Lampung Telp: (0721) 703160

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul, "**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Provinsi di pulau Sumatera Tahun 2011-2018)"
disusun oleh: **Derista Rizkyani**, NPM: 1551010024, Jurusan: **Ekonomi Syariah**,
Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung pada Hari Tanggal **Rabu, 18 Desember 2019**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E, M.Si**

Sekretaris : **Dimas Pratomo, S.E.I, M.E**

Penguji I : **A. Zuliansyah, S.Si, MM**

Penguji II : **Gustika Nurmalia, S.E.I, M.Ek**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP : 198008012003121001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya : “ Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah [94] : 5)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabiil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang (Ayahanda Risko Handoko, dan Ibunda kholipah) serta kakek (abah halani) yang sangat aku hormati, dan sangat aku cintai, selalu menguatkan ku dengan sepenuh hati, yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, memotivasiku dan selalu mendoakan ku agar selalu kuat menjalani setiap rintangan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikku tersayang Rahma Fahira dan Riski Sapta Ferdiansah, terima kasih atas doanya serta dukungan yang begitu berharga bagi hidupku.
3. sahabat-sahabat seperjuangan: Annisatul lathifa, Eka Fitri, Laras Puritama, Linda Melati Oktavia, Mitha Anggraini, dan teman yang selalu menemaniku, Desi Marlina terimakasih untuk selalu memberikan semangat, do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas C yang tidak disebutkan namanya satu persatu.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan.

RIWAYAT HIDUP

Derista Rizkyani dilahirkan di Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret 1997 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Risiko Handoko dan Ibu Kholipah.

1. Taman Kanak-Kanak Rose cibubur Jakarta Timur pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Kali Balau Kencana dan tamat pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan strata 1 pada tahun 2015 dan di terima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah melalui jalur SPAN-PTKIN.

Semasa studi, penulis pernah aktif di salah satu organisasi kampus atau jurusan antara lain: UKMF RISEF FEBI sebagai Staff divisi kemuslimahan dan UKM Hiqmah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 ”* dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Budimansyah, S.Th., M.Kom.I (Pembimbing I) dan Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing saya yang senantiasa sabar memberikan arahan, motivasi, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.
6. Guru/Ustadz/Murabbi terbaikku sejak duduk dibangku SD sampai dengan S1. *Jazakumullah*, karena jasa-jasa dan do'amulah penulis sampai pada titik ini. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan hidup.
7. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya kelas C angkatan 2015. Terimakasih telah memberikan semangat dan telah berjuang bersama dari semester bersama hingga saat ini.

9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah membalas budi baik kalian semua.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, September 2019
Penulis,

Derista Rizkyani
NPM. 1551010024

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Batasan Masalah | 12 |
| E. Rumusan Masalah | 13 |
| F. Tujuan Penelitian | 13 |
| G. Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kemiskinan | 15 |
| 1. Definisi Kemiskinan | 15 |
| 2. Ukuran dan Indikator Kemiskinan | 20 |
| 3. Macam-macam Kemiskinan | 22 |
| 4. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam | 25 |
| B. Indeks Pembangunan Manusia | 33 |
| 1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia | 33 |
| 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 36 |
| 3. Hubungan IPM dengan Kemiskinan | 40 |
| 4. IPM dalam Perspektif Islam | 40 |

| | |
|---|----|
| C. Pengangguran..... | 44 |
| 1. Definisi pengangguran..... | 44 |
| 2. Penyebab Pengangguran..... | 46 |
| 3. Macam-macam Pengangguran..... | 47 |
| 4. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan..... | 49 |
| 5. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 50 |
| D. Produk Domestik Regional Bruto..... | 54 |
| 1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto..... | 54 |
| 2. Hubungan PDRB dengan Kemiskinan..... | 56 |
| 3. PDRB dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 56 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 59 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 62 |
| G. Hipotesis..... | 65 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan Penelitian..... | 70 |
| B. Teknik Pengumpulan Data..... | 71 |
| C. Teknik pengambilan populasi dan sample..... | 72 |
| D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional..... | 72 |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 73 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|-----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 81 |
| B. Analisis Data..... | 85 |
| 1. Analisis Deskriptif..... | 85 |
| a. Analisis Deskriptif IPM di Pulau Sumatera..... | 85 |
| b. Analisis Deskriptif Pengangguran di Pulau Sumatera..... | 87 |
| c. Analisis Deskriptif PDRB di Pulau Sumatera..... | 88 |
| 2. Analisis Regresi Panel..... | 89 |
| a. <i>Common Effect</i> | 90 |
| b. <i>Fixed Effect</i> | 91 |
| c. <i>Random Effect</i> | 93 |
| 3. Pemilihan Model Regresi..... | 95 |
| a. Uji <i>Chow</i> | 95 |
| b. Uji <i>Hausman</i> | 96 |
| 4. Uji Statistik Analisis Regresi..... | 97 |
| a. Uji Parsial (t-Statistik)..... | 97 |
| b. Uji F-statistik..... | 98 |
| c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 99 |
| C. Pembahasan..... | 100 |
| 1. Interpretasi Koefisien <i>Random Effect</i> | 100 |
| 2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera..... | 104 |
| 3. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera..... | 106 |

| | |
|---|-----|
| 4. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera..... | 108 |
| 5. Pengaruh IPM, Pengangguran, dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera..... | 109 |
| 6. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 110 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran | 118 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|------------|--|
| Tabel 1.1 | Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia.....5 |
| Tabel 1.2 | Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018.....7 |
| Tabel 1.3 | Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018.....9 |
| Tabel 1.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2018.....10 |
| Tabel 1.5 | PDRB menurut Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2018.....11 |
| Tabel 3.1 | Daftar Operasional Variabel.....73 |
| Tabel 4.1 | Kota Besar di Sumatera Berdasarkan Jumlah Populasi 2014.....83 |
| Tabel 4.2 | Hasil regresi data panel dengan metode <i>common effect</i>90 |
| Tabel 4.3 | Hasil regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i>91 |
| Tabel 4.4 | Hasil regresi data panel dengan metode <i>random effect</i>93 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji <i>chow</i>95 |
| Tabel 4.6 | Hasil Uji <i>hausman</i>96 |
| Tabel 4.7 | Hasil Uji <i>t</i>97 |
| Tabel 4.8 | Hasil Uji <i>F</i>98 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....99 |
| Tabel 4.10 | Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>101 |
| Tabel 4.11 | Hasil Uji <i>t</i> Variabel Indeks Pembangunan Manusia.....105 |
| Tabel 4.12 | Hasil Uji <i>t</i> Pengangguran.....106 |
| Tabel 4.13 | Hasil uji <i>t</i> variabel Produk Domestik Regional Bruto.....108 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Skema Perangkat Kemiskinan | 18 |
| Gambar 2.2 | Teori Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse..... | 24 |
| Gambar 2.3 | Teori Lingkaran Keadilan Khaldun..... | 28 |
| Gambar 2.4 | Skema Kerangka Pikiran..... | 63 |
| Gambar 4.1 | Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 (dalam persen)..... | 85 |
| Gambar 4.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 (dalam satuan persen)..... | 87 |
| Gambar 4.3 | Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi di Pulau sumatera Tahun 2011-2018 (dalam satuan persen)..... | 89 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 01 Data Analisis Regresi Panel
- Lampiran 02 Tingkat Kemiskinan menurut Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018
- Lampiran 03 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2018
- Lampiran 04 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2018
- Lampiran 05 PDRB menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018
- Lampiran 06 Hasil regresi data panel dengan metode *common effect*
- Lampiran 07 Hasil regresi data panel dengan metode *fixed effect*
- Lampiran 08 Hasil regresi data panel dengan metode *random effect*
- Lampiran 09 Hasil uji *chow*
- Lampiran 10 Hasil uji *hausman*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul :

“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Provinsi di pulau Sumatera Periode Tahun 2011 – 2018)”.

Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah – istilah judul tersebut sebagai berikut

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

Pengaruh juga merupakan suatu penelitian yang mencari atau pertautan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 1045

nilai antar suatu variabel dengan variabel lain. Dengan kata lain kedua variabel atau lebih akan saling berhubungan dan akan menghasilkan sesuatu hal yang baru.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Adalah proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.²

3. Pengangguran

Adalah seseorang yang sudah di golongan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan.³

4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.⁴

5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.⁵

6. Perspektif adalah sudut pandang : pandangan⁶

² M. Bhakti Setiawan, dkk, *Indeks Pembangunan Manusia*. (Jurnal Ekonomika, Vol 9, No. 1, April 2013), h. 18

³ Sadono sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta : rajawali pers, 2016), h. 472.

⁴ <https://www.Bps.go.id/subjek/view/id/52>. diunduh tanggal 5 juli 2019, pukul 21:14 WIB

⁵ *Ibid*

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.864.

7. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah

1. Alasan Objektif

- a. Meskipun persentase penduduk miskin di pulau sumatera tergolong rendah dibandingkan pulau lain se- Indonesia yaitu dengan rata-rata 10,39 persen dibawah pulau maluku dan papua 21,20 persen pulau Bali dan Nusa Tenggara 14,02 persen dan pulau sulawesi 10,64 persen. Akan tetapi jumlah penduduk miskin di pulau sumatera menduduki peringkat kedua tertinggi sejak tahun 2011-2018 dimana 5,9 juta penduduknya berada dibawah garis kemiskinan.
- b. Wilayah Pulau Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup nasional, regional ASEAN, maupun global. Dalam lingkup nasional (Indonesia) wilayah Pulau Sumatera memiliki potensi utama untuk mengembangkan perekonomian yaitu merupakan sentra produksi (karet dan kelapa sawit) dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi (pertambangan dan batubara) nasional.

⁷ Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.11.

2. Alasan Subjektif

- a. Karena data dan sumber referensi terkait dengan judul penelitian dapat diperoleh dan telah tersedia di Badan Pusat Statistik Indonesia.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Dihampir semua negara berkembang, standar hidup sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, tidak hanya jika dibandingkan dengan standar hidup orang – orang di negara kaya, namun juga dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan .⁸

Menurut Mudrajat Muncoro, penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas.

⁸ Denni setiawan Jayadi, Aloysius Gunadi Bata, *Peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2004 – 2012*, ISSN : 0852 - 1875 *MODUS Vol.28 (1) : 87 – 99, 2016*

Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasiberakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angkapengangguran).⁹

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang masih sulit terpecahkan hampir di setiap daerah di Indonesia, selain itu kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnyakemiskinan.¹⁰

Tabel 1.1
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Menurut Pulau di Indonesia

| Provinsi | Persentase Penduduk Miskin (%) | Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) |
|------------------------|---------------------------------------|--|
| Sumatera | 10,39 | 5,9 |
| Jawa | 8,94 | 13,34 |
| Bali dan Nusa Tenggara | 14,02 | 2,06 |
| Kalimantan | 6,09 | 0,98 |
| Sulawesi | 10,64 | 2,00 |
| Maluku dan Papua | 21,20 | 1,52 |

⁹ Prima sukmagara, *Analisis Pengaruh IPM, PDRB per kapita, Dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi UNDIP Semarang dipublikasikan tahun 2011.

¹⁰ Sussy susanti, *Pengaruh PDRB, Pengangguran dan IPM Terhadap kemiskinan di Jawa Barat Dengan Analisis Data Panel*, (*Jurnal Matematika Integratif Vol 9, No. 1, April 2013*), h. 1-18

| | | |
|-----------|-------|-------|
| Indonesia | 10,12 | 26,58 |
|-----------|-------|-------|

Sumber: *BPS Indonesia, Diolah dari Susenas Maret 2018*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa menurut persentase, Pulau Maluku dan Papua memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi yaitu dengan persentase 21,20 persen. dan menurut jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu ada 13,34 juta orang miskin tinggal di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera berada di urutan ke empat lebih kecil dari wilayah yang lain yaitu sebesar 10,39 persen, tetapi memiliki peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu ada 5,9 juta penduduknya berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di pulau Kalimantan yaitu 0,98 juta orang.

Berdasarkan tabel 1.1 maka kemiskinan di Pulau Sumatera masih tergolong tinggi, dikarenakan rata-rata kemiskinan penduduk pulau sumatera masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Nasional. Kemiskinan penduduk pulau Sumatera yaitu sebesar 10,39 persen, sedangkan rata-rata kemiskinan penduduk Nasional hanya sebesar 10,12 persen. Dan Jumlah penduduk miskin di pulau Sumatera masih tergolong besar karna masih banyak beberapa provinsi di pulau sumatera yang memiliki persentase tingkat kemiskinan tergolong tinggi. Pulau Sumatera memiliki 10 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan

Riau. Tingkat kemiskinan di setiap Provinsi di Pulau Sumatera berbeda-beda. Berikut adalah gambaran dari tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2018.

Tabel 1.2
Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2011-2018

| Provinsi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata-rata |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Aceh | 19,57 | 18,58 | 17,72 | 16,98 | 17,11 | 16,43 | 15,92 | 15,68 | 17,24 |
| Sumatera Utara | 11,33 | 10,41 | 10,39 | 9,85 | 10,79 | 10,27 | 9,28 | 8,94 | 10,15 |
| Sumatera Barat | 9,04 | 8,00 | 7,56 | 6,89 | 6,71 | 7,14 | 6,75 | 6,55 | 7,33 |
| Riau | 8,47 | 8,05 | 8,42 | 7,99 | 8,82 | 7,67 | 7,41 | 7,21 | 8,05 |
| Jambi | 8,65 | 8,28 | 8,41 | 8,39 | 9,12 | 8,37 | 7,9 | 7,85 | 8,37 |
| Sumatera Selatan | 14,24 | 13,48 | 14,06 | 13,62 | 13,77 | 13,39 | 13,1 | 12,82 | 13,56 |
| Bengkulu | 17,5 | 17,51 | 17,75 | 17,09 | 17,16 | 17,03 | 15,59 | 15,41 | 16,88 |
| Lampung | 16,93 | 15,65 | 14,39 | 14,21 | 13,53 | 13,86 | 13,04 | 13,01 | 14,32 |
| Bangka Belitung | 5,75 | 5,37 | 5,25 | 4,97 | 4,83 | 5,04 | 5,3 | 4,77 | 5,16 |
| Kepulauan Riau | 7,4 | 6,83 | 6,35 | 6,40 | 5,78 | 5,84 | 6,13 | 5,83 | 6,32 |
| Rata-rata | 11,88 | 11,22 | 11,03 | 10,63 | 10,76 | 10,50 | 10,04 | 9,80 | |

Sumber : BPS Indonesia, *Data dan Informasi Menurut Provinsi Tahun 2011-2018*

Berdasarkan tabel 1.2 pada angka persentase rata-rata kemiskinan penduduk dapat menunjukkan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 rata-rata kemiskinan penduduk di pulau sumatera sebesar 11,88 persen, sampai pada tahun 2014 sebesar 10,63 persen masih terjadi penurunan. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,76

persen dan turun kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,50 persen sampai pada tahun 2018 masih terjadi penurunan sebesar 9,80 persen. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2011 merupakan tahun yang paling tinggi tingkat kemiskinan penduduk di pulau sumatera.

Sedangkan berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing Provinsi di pulau Sumatera yang paling tinggi dari tahun 2011-2018 terdapat di Provinsi Aceh dengan rata-rata 17,24 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Provinsi Aceh yaitu Provinsi Bengkulu dengan rata-rata 16,88 persen. Dan untuk persentase kemiskinan yang paling rendah ada di Provinsi Bangka Belitung dengan rata-rata 5,16 persen. Maka dapat dilihat pada tabel diatas dari tingkat kemiskinan 10 Provinsi tahun 2011-2018 dapat disimpulkan bahwa di Pulau Sumatera hanya terdapat 5 Provinsi yang memiliki persentase kemiskinan yang tergolong tinggi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau

dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.¹¹

Untuk mengetahui lebih jelasnya tingkat IPM di Pulau Sumatera dapat dilihat tabel 1.3

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2018

| Provinsi | [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (%) | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ACEH | 67.09 | 67.45 | 67.81 | 68.3 | 68.81 | 69.45 | 70 | 70.6 | 71.19 |
| SUMATERA UTARA | 67.09 | 67.34 | 67.74 | 68.36 | 68.87 | 69.51 | 70 | 70.57 | 71.18 |
| SUMATERA BARAT | 67.25 | 67.81 | 68.36 | 68.91 | 69.36 | 69.98 | 70.73 | 71.24 | 71.73 |
| RIAU | 68.65 | 68.9 | 69.15 | 69.91 | 70.33 | 70.84 | 71.2 | 71.79 | 72.44 |
| JAMBI | 65.39 | 66.14 | 66.94 | 67.76 | 68.24 | 68.89 | 69.62 | 69.99 | 70.65 |
| SUMATERA SELATAN | 64.44 | 65.12 | 65.79 | 66.16 | 66.75 | 67.46 | 68.24 | 68.86 | 69.39 |
| BENGKULU | 65.35 | 65.96 | 66.61 | 67.5 | 68.06 | 68.59 | 69.33 | 69.95 | 70.64 |
| LAMPUNG | 63.71 | 64.2 | 64.87 | 65.73 | 66.42 | 66.95 | 67.65 | 68.25 | 69.02 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 66.02 | 66.59 | 67.21 | 67.92 | 68.27 | 69.05 | 69.55 | 69.99 | 70.67 |
| KEP. RIAU | 71.13 | 71.61 | 72.36 | 73.02 | 73.4 | 73.75 | 73.99 | 74.45 | 74.84 |

Sumber: BPS Indonesia, April 2019

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah khususnya di Pulau Sumatera adalah faktor pengangguran. Hal tersebut di karenakan semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka akan berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Pengangguran bisa

¹¹ M. Alhudori, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, (*Jurnal economics and Business, Vol. 1, No. 1, September 2017*)

disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Maka artinya, semakin tinggi jumlah pengangguran sehingga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.¹²

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi
di Pulau Sumatera tahun 2011-2018 (dalam satuan persen)

| Provinsi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Aceh | 9 | 9.06 | 10.12 | 9.02 | 9.93 | 7.57 | 6.57 | 6.36 |
| Sumatera Utara | 8.18 | 6.28 | 6.45 | 6.23 | 6.71 | 5.84 | 5.6 | 5.56 |
| Sumatera Barat | 8.02 | 6.65 | 7.02 | 6.5 | 6.89 | 5.09 | 5.58 | 5.55 |
| Riau | 6.09 | 4.37 | 5.48 | 6.56 | 7.83 | 7.43 | 6.22 | 6.2 |
| Jambi | 4.63 | 3.2 | 4.76 | 5.08 | 4.34 | 4 | 3.87 | 3.86 |
| Sumatera Selatan | 6.6 | 5.66 | 4.84 | 4.96 | 6.07 | 4.31 | 4.39 | 4.23 |
| Bengkulu | 3.46 | 3.62 | 4.61 | 3.47 | 4.91 | 3.3 | 3.74 | 3.51 |
| Lampung | 6.38 | 5.2 | 5.69 | 4.79 | 5.14 | 4.62 | 4.33 | 4.06 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3.86 | 3.43 | 3.65 | 5.14 | 6.29 | 2.6 | 3.78 | 3.65 |
| Kepulauan Riau | 5.38 | 5.08 | 5.63 | 6.69 | 6.2 | 7.69 | 7.16 | 7.12 |

Sumber : BPS Indonesia, Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Januari 2019

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk di suatu wilayah

¹² Ridzky Giovanni, *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016*, (Economics Development Analysis Journal, Vol 7, No. 1, 2018)

telah menikmati kemakmuran. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.¹³ Berikut disajikan tabel data laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan menurut Provinsi se Pulau Sumatera.

Tabel 1.5

PDRB menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018

| Provinsi | [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen) | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ACEH | 3.28 | 3.85 | 2.61 | 1.55 | -0.73 | 3.3 | 4.18 | 4.61 |
| SUMATERA UTARA | 6.66 | 6.45 | 6.07 | 5.23 | 5.1 | 5.18 | 5.12 | 5.18 |
| SUMATERA BARAT | 6.34 | 6.31 | 6.08 | 5.88 | 5.53 | 5.27 | 5.29 | 5.14 |
| RIAU | 5.57 | 3.76 | 2.48 | 2.71 | 0.22 | 2.18 | 2.68 | 2.34 |
| JAMBI | 7.86 | 7.03 | 6.84 | 7.35 | 4.21 | 4.37 | 4.64 | 4.71 |
| SUMATERA SELATAN | 6.36 | 6.83 | 5.31 | 4.79 | 4.42 | 5.04 | 5.51 | 6.04 |
| BENGKULU | 6.85 | 6.83 | 6.07 | 5.48 | 5.13 | 5.28 | 4.98 | 4.99 |
| LAMPUNG | 6.56 | 6.44 | 5.77 | 5.08 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.25 |
| KEP. BANGKA | | | | | | | | |
| BELITUNG | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.67 | 4.08 | 4.1 | 4.47 | 4.45 |
| KEP. RIAU | 6.96 | 7.63 | 7.21 | 6.6 | 6.01 | 4.98 | 2 | 4.56 |

Sumber: BPS Indonesia 2015

Dilihat dari data beberapa variabel ekonomi berupa Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2018 yang menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi pada beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun

¹³ *Ibid*

Pulau Sumatera menjadi salah satu daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun permasalahan kemiskinan di Pulau Sumatera masih menjadi permasalahan yang krusial yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera yang masih di atas rata-rata kemiskinan Nasional. Sedangkan dilihat dari variabel tingkat pengangguran yang menunjukkan kondisi yang tidak stabil dalam arti mengalami kondisi naik dan turun disetiap tahunnya juga belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi pada Provinsi di pulau Sumatera.

Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, dan pengangguran terbuka belum maksimal dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu dari permasalahan di atas penulis tertarik pada penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera.

D. Batasan Masalah

Demi memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Yaitu hanya berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2011-2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam. Maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah IPM, Pengangguran, dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara parsial pada Provinsi di pulau Sumatera Tahun 2011-2018?
2. Apakah IPM, Pengangguran, dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara simultan pada Provinsi di pulau Sumatera Tahun 2011-2018?
3. Bagaimana Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu variabel IPM, Pengangguran, dan PDRB terhadap tingkat kemiskina Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018 secara parsial.

- b. Untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu variabel IPM, Pengangguran, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di pulau Sumatera tahun 2011-2018 secara simultan.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2018.

2. Manfaat

a. Secara teoritis

1) Bagi ilmu pengetahuan

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dan dijadikan sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan serta penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

1) Bagi pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk memahami variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera sehingga diperoleh pilihan strategi pengambilan kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan perencanaan pembangunan khususnya di Pulau Sumatera.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Pada konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, berdasarkan pendekatan ini, konsep garis kemiskinan (GK) dibangun di atas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). GKM dihitung dengan pendekatan kalori, dimana standar kebutuhan kalori minimal seseorang adalah setara dengan angka 2.100 kkal. Adapun GKBM dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas bukan makanan, yaitu sebanyak 47 komoditas untuk daerah pedesaan dan 51 komoditas untuk daerah perkotaan. Suatu

penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK.¹⁴

Pendekatan kemiskinan seperti ini menurut Todaro dan Smith pada dasarnya mencerminkan konsep kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dimana kebutuhan ini dihitung dengan *monetaryvalue* tertentu sebagai batasannya. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berada dibawah nilai uang tertentu.

Selain itu World Bank mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan (yang dihalalkan), harga diri, dan rasa hormat seperti orang lain.¹⁵ Menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak cukup hanya diukur dengan ukuran pendapatan saja, tetapi juga terkait hilangnya kapabilitas. Hal ini menentukan apa yang akan dilakukannya terhadap sumber daya yang dimilikinya. Kapabilitas seseorang untuk menjalankan fungsinya tersebut dapat menentukan status seseorang apakah termasuk dalam kategori miskin atau tidak. Menurut kuncoro,

¹⁴ Riyadi dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik BPS, 2015), h. 122-123

¹⁵ M.alhudori..., h. 117

kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.¹⁶ Secara umum konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.¹⁷

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan.

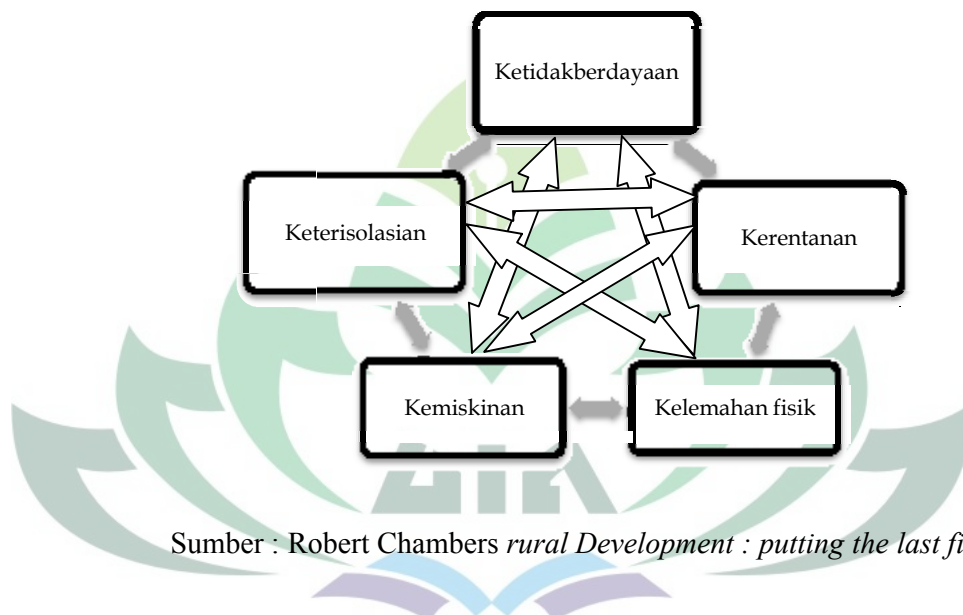
Pemahaman tentang kemiskinan, termasuk didalamnya terkait bagaimana mengukur kemiskinan, terus mengalami perkembangan. Robert Chambers misalnya, mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Menurutnya, kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi

¹⁶ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), h.102-103.

¹⁷ Muana Nanga dkk, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi* (Jakarta : Kedepuitan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), h. 7

kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri. Menurut Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005)¹⁸, menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu:

Gambar 2.1
Skema Perangkap Kemiskinan



Sedangkan menurut Mudrajat Muncoro, penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circken of Poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan

¹⁸ Criswardani Suryawati, C. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. Jurnal Maanajemen Pelayanan kesehatan. 2005. Vol 08 No. 03.

rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.¹⁹

Gambar 2.2
Teori Lingkaran Kemiskinan Nurkse



Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral,

¹⁹ Prima sukmagara, *Analisis Pengaruh IPM, PDRB per kapita, Dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi UNDIP Semarang dipublikasikan tahun 2011.

standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Ukuran dan Indikator Kemiskinan

Secara global, *United Nations Development Programs* (UNDP) sejak tahun 1990, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan tentang pembangunan manusia di berbagai negara yaitu *Human Development Report*. Salah satu indeks yang diperkenalkan adalah indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Index/HPI*) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Untuk menyempurnakan dari kelemahan menggunakan HPI, berkembang pendekatan kemiskinan multidimensi (*Multidimensional Poverty Index/MPI*) yang menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang masing-masing terdiri atas dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta enam indikator untuk dimensi standar hidup.²⁰

Alkire dan Foster mengusulkan metode pendekatan baru dalam mengidentifikasi penduduk miskin, yakni dengan sistem pembobotan dengan nilai berkisar antara 0-1. Jika satu dimensi terdiri dari beberapa indikator, bobot setiap indikator dalam dimensi yang sama

²⁰Muana Nanga dkk, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi* (Jakarta : Kedeputian bidang kependudukan dan ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), h. 10

memiliki nilai yang setara. Ambang batas kedua adalah jumlah maksimal total bobot, dengan kondisi seseorang dinyatakan miskin berdasarkan seluruh dimensi yang ada. Foster dkk, memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan²¹ yaitu:

- 1) *The incidence of poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan
- 2) *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *Poverty Gap Index*. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
- 3) *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan *distributionally sensitive index* dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.²²

3. Macam – Macam Kemiskinan

²¹ Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta : LP3ES, 2016), h. 96-97.

²² *Ibid*, h. 97

Menurut Arsyad kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu²³ :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.

Sharp *et.al.* dalam kuncoro mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:²⁴

²³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 302

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut antara lain yaitu rendahnya akses modal usaha, lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar, dan sedikitnya kepemilikan aset.

Selain kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses sosial. Adapun hal tersebut yaitu : Rendahnya akses pendidikan dan akses fasilitas kesehatan.

Alat ukur kemiskinan adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. saat ini telah digunakan sejumlah alat

²⁴ Denni Seiawan Jayadi, Aloysius Gunadi Bata.....,h. 87-99

ukur / metode yang umumnya didasarkan pada konsep kemiskinan yang fokus pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat fisik, seperti pangan dan perumahan. Yang paling umum digunakan adalah *head count index* untuk menghitung jumlah penduduk miskin, *poverty gap* dan *income gap ratio* untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, serta *sen index* dan FGT (*Foster, Greer and Thorbecke*) *index* untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan.²⁵

Tingkat kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengetahui berapa selisih atau jarak antara pendapatan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang diterapkan di suatu negara. Semakin besar selisih atau jarak di antara keduanya, berarti semakin dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Konsekuensinya akan semakin besar dana yang diperlukan untuk mengeluarkan seseorang atau suatu keluarga dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan digunakan untuk menilai seberapa parah kemiskinan yang terjadi, dengan memperhitungkan juga kesenjangan antarpenduduk miskin. *Head count index* adalah konsep rumus yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Adapun formula untuk mengukur *head*

²⁵Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016), h. 84

countindex adalah sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i= 1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk

4. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.²⁶ Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian: 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materil dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana

²⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group 2015), h. 23

yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, bahwasannya Rasulullah SAW sendiri pernah memohon perlindungan Allah SWT dari kemiskinan. Apabila memang kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu meminta permohonan perlindungan kepada Allah dari kemiskinan.²⁷ Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut, yang artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan.”(HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majjah)

Qarhawi menyatakan beberapa pendirian terhadap masalah kemiskinan. Pertama, pendirian yang menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini kemiskinan bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi harus dibiarkan, karena dengan demikian manusia bisa berkonsentrasi berhubungan dengan Tuhannya, tidak diganggu dengan urusan duniawi. Kedua, pendirian para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan takdir Allah dan manusia harus sabar dengan ujian itu. Ketiga, pendirian ketiga sama

²⁷ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 23

dengan fatalis, namun mereka maju selangkah, yaitu secara perorangan mereka harus membantu orang-orang miskin. Mazhab ini dikenal sebagai “kebajikan pribadi”. Keempat, kaum kapitalis memandang kemiskinan menimbulkan problem yang harus diselesaikan dengan orang miskin sendiri, sedangkan orang kaya bebas dalam menggunakan hartanya. Kelima, kaum Marxis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi kalau kaum borjuis dan kekayaannya tidak dimusnahkan, tetapi ditata kelas-kelas baru.

Menurut al-Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) Berusaha dan bekerja, (2) Larangan menumpuk harta, (3) Zakat, (4) Hukum Waris, (5) Ganimah, (6) Hemat.²⁸

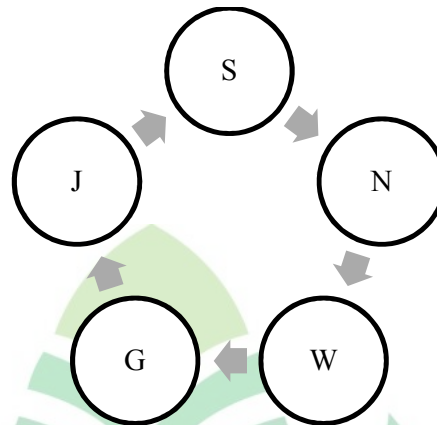
Keseimbangan ekonomi dengan definisi wujudnya keharmonisan antara pembangunan dan kesejahteraan, baik ekonomi maupun sosial, menjadi sebuah indikator utama dari kebenaran suatu sistem ekonomi. Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menunjukkan membuat sebuah variabel-variabel kemudian digabungkan dan dihubungkan antara masing-masing variabel tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan sebuah negara yang makmur dimana variabel dependennya adalah kemajuan suatu negara

²⁸*Ibid*, h. 25

(g) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.3:

Gambar 2.3

Teori Lingkaran keadilan khaldun



Keterangan :

- Syariah dilambangkan dengan (S)
- Masyarakat dilambangkan dengan (N)
- Kekayaan atau *Wealth* dilambangkan dengan (W)
- Pembangunan dilambangkan dengan (g)
- Keadilan atau *Justice* dilambangkan dengan (J)

Masing-masing variabel independen tersebut mempunyai pengaruh dan dampak yang menentukan kemajuan suatu negara (g) atau kemundurannya. Konsep khaldun tersebut memiliki keunggulan tersendiri yaitu satu variabel bisa menjadi penggerak, sedangkan variabel yang lain dapat bergerak ataupun tidak dalam arah yang sama. Chapra merumuskan pemikiran Khaldun dengan lingkaran,

yaitu lingkaran keadilan, negara hanya satu komponen dari beberapa komponen yang ada maka upaya penegakan Islam dapat dimulai dari komponen yang paling mungkin di zaman dan wilayah tertentu.²⁹ Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan, dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-Qur'an menyebut mereka sebagai para pendusta.³⁰ Sebagaimana dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3:

﴿الْيَتِيمَ الَّذِي تُكْذِبُ الَّذِينَ يُبْذَلُونَ عَلَيْهِمْ﴾
 ﴿الْمَسْكِينِ طَعَامِهِمْ عَلَىٰ حُضْرٍ وَلَا

Artinya:

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardikan anak yatim,
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

(QSAI Ma'un: 1-3).³¹

²⁹ Ibid....., h. 30

³⁰ Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyanti....., h. 71

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al quran dan terjemah perkata. (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 602

Terkait dengan definisi fakir miskin, maka ada perbedaan pendapat diantara mazhab Syafii dan Hambali dengan mazhab Hanafi dan maliki. Menurut mazhab Syafii dan Hambali, orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.³² Hal ini didasarkan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. Al-Kahfi ayat 79:

وَكَانَ أَعْيَاهَا أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ لِي سَفِينَةٌ أَمَّا
 غَضَبًا سَفِينَةٌ كُلِّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَرَاءَهُمْ

Artinya : “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.

(QS. AlKahfi: 79)³³

Sementara orang fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus yang syar’i (*uzur syar’i*), seperti usia tua dan sakit-sakitan, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Adapun definisi fakir dan miskin menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah kebalikan dari definisi mazhab Syafii dan Hambali. Meski demikian, dari sisi praktik, perbedaan ini tidak terlalu signifikan karena kedua-duanya adalah kelompok yang harus dibantu, baik melalui dana zakat, infak maupun shadaqah.³⁴

³² Irfan Syauqi Beik, *Ibid....*, h. 72

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid....*, h. 302

³⁴ Irfan Syauqi Beik *Ibid.*

Islam juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Orang miskin yang malas berusaha sangat dikecam dalam ajaran Islam. Orang yang suka meminta-minta karena malas bekerja, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, akan kehilangan wajahnya pada hari kiamat nanti. Justru islam mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak, meski dengan jumlah yang sangat sedikit. Jangan sampai orang tidak pernah berbagi sepanjang hidupnya, dengan alasan kemiskinan.³⁵

Islam telah mengembangkan lingkungan sosial-ekonomi yang memberikan perhatian khusus untuk pengentasan kemiskinan, selain berfokus pada distribusi pendapatan dan kekayaan atau mengurangi kesenjangan. Kemiskinan dalam Islam berkaitan dengan konsep kebutuhan (*maqasidh syariah*). Konsep tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dalam Islam definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materil semata, namun juga terkait dengan kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah. Dengan demikian dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, tidak hanya materil namun juga rohani atau spiritual, dan tidak hanya bersifat duniawi namun juga ukhrawi. Dalam menyusun standar kebutuhan pokok, dan dalam mendefinisikan kemiskinan, maka perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual, harus dapat dikalkulasikan dan

³⁵ Irfan Syauqi Beik, *Ibid....*, h. 73

didefinisikan dengan baik. Sehingga, definisi kemiskinan pun dapat dikembangkan menjadi kemiskinan materil dan kemiskinan spiritual.³⁶ Pada kemiskinan materil, penyebabnya adalah lebih kepada alasan yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan pokok diri dan keluarga. Adapun kemiskinan spiritual lebih disebabkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat, atau ada unsur kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan ajaran agama, karena pengaruh hawa nafsu, seperti sifat serakah dan kikir, maupun pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat seperti pengaruh paham sekulerisme dan liberalisme agama.³⁷

Keberhasilan Islam dalam mengatasi kemiskinan, bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata. Perjalanan panjang sejarah kaum muslim, membuktikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar dapat direalisasikan. Yaitu ketika kaum muslim hidup dibawah naungan negara khilafah yang menerapkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh).sejarah tercatat bahwa khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah: “Jika kamu memberikan shadaqah, maka cukupkanlah”, selanjutnya berkata lagi: “Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki

³⁶ Irfan Syauqi Beik, *Ibid....*, h. 74

³⁷ Irfan Syauqi Beik *Ibid....*, h. 75

seratus onta”³⁸ Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum muslim yang tidak mampu, membayar hutang-hutang mereka dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.³⁹

B. Indeks Pembangunan Manusia

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Konsep Indeks Pembangunan Manusia di dasarkan pada teori *Human Capital* yaitu suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktifitas ekonomi, seperti produksi konsumsi, dan transaksi.⁴⁰ Seiring, berkembangnya teori ini, konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa model manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

³⁸ Abdurrahman al-Baghdadi, *Ulama dan Penguasa di Masa Kejayaan dan Kemunduran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h.38.

³⁹ Akhmad Mujahidin, Pengentasan Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

⁴⁰

Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu. Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia.

Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Konsep ini menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. Franke & Bemanke berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, ketrampilan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Schultz menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik. *human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan

keterampilannya. Sehingga produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Menurut *United Nations Development Programme*(UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, standar hidup yang diukur pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Menurut BPS, IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak. IPM mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.⁴¹

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.⁴² IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu : Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak.⁴³

2. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Harapan hidup

Pengukuran indikator kesehatan dalam *human capital* dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks

⁴¹ M. Alhudori....., h.

⁴² Sussy Susanti..., h. 5

⁴³ *Ibid*....., h. 6

dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.⁴⁴ Menurut BPS harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang selama hidup.⁴⁵ Dengan demikian Angka harapan hidup dapat mengukur dari sejak lahir dalam rata-rata hidup di suatu penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas indikator kesehatannya.

Angka harapan hidup diukur melalui metode tidak langsung (Metode Brass, Varian Trussel) dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi orang meninggal. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah anak-anak lahir hidup dan anak-anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.⁴⁶ Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011-2013 yaitu:⁴⁷

- 1). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- 2). Rata-rata lama sakit (hari).
- 3). Angka kesakitan (%)

⁴⁴M. Alhudori, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, Vol. 1, No.1, September (*Jurnal of Economic and Business*, 2017) hal. 117

⁴⁵Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*,... h.30

⁴⁶Christina Usmaliadanti, "Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009".(Disertai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h.40.

⁴⁷*Ibid.* h.59

4). Persentase pemberian ASI.

5). Rata-rata bayi disusui (Bulan).

Indikator-indikator diatas dapat meningkatkan angka harapan hidup, Sehingga indikator tersebut memaksa pemerintah untuk meningkatkan program-program kesehatan seperti peningkatan pelayanan publik yang dapat memicu meningkatkan harapan hidup penduduk.

b. Tingkat Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.⁴⁸ Perhitungan indeks pembangunan terbagi dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.bps.go.id>. diunduh tanggal 31 Desember 2019, pukul 20.22 WIB

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*,h.10.

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dalam cakupan luas menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diminati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukkan berapa seharusnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang secara layak.⁵⁰ Untuk mengukur standar hidup layak (daya beli) UNDP menggunakan GNP riil yang di sesuaikan. PNB perkapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menggunakan data SUSENAS.⁵¹ Perhitungan paritas daya beli menggunakan metode baru yaitu 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.⁵² Dalam perhitungannya menggunakan batasan minimum dan maksimum.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X1}) + (\text{Indeks X2}) + (\text{Indeks X3})$$

Keterangan:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

⁵⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti,h.147

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*,h.5.

⁵² *Ibid* h.10.

3. Hubungan IPM dengan kemiskinan

Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan tinggi rendahnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Dengan rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan kerja. Adapun indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tingkat Pendidikan, kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Angka Melekat Huruf.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prima Sukmaraga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan yang berarti bahwa setiap peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada peningkatan produktivitas kerja dari penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan pendapatan dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Perspektif ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia (*Islamic Human Development Index/ I-HDI*) mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan (*masalah*) dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi, *masalah* dasar bagi manusia terdiri lima hal yaitu, agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-*

nasl), dan harta (*al-mal*).⁵³ Ekonomi islam memberi sebuah konseptori dalam sebuah ilmu pembangunan Syariah. Pada Pendekatan konsep Ekonomi Pembangunan syariah ini bahwa suatu pembangunan sangat bergantung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Bangsa. Manusia merupakan Subjek sekaligus Objek Pembangunan.⁵⁴ Sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan suatu pembangunan di setiap negara, Oleh karena itu peran pemerintah harus memperhatikan dalam memicu kemajuan dalam pembangunan Negara. Islam memandang bahwa manusia memiliki dua tugas yang utama diantaranya sebagai *abdullah* (hamba allah) dan *Khalifatullah fil ard* yaitu wakil allah dimuka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.⁵⁵ Bagi islam, pembangunan yang dilakukan manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama, yaitu keajahteraan umat. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bernilai tidak miskin dan tidak juga menderita.⁵⁶ Firman Allah SWT dalam surah An-anbiyah ayat 107 sebagai berikut:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

⁵³ A.Alif Nafilah.K, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Islamic Human Index terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2014*, Skripsi (Surabaya: UNAIR, 2016) hal. 21

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*,... h.15

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Jaenal Efendi, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Disertai Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2005), h. 44

Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵⁷

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan hambanya berdasarkan rahmat dan kehendak Allah SWT, karena manusia diciptakan untuk menjalankan tugas dunia dan membangun kesejahteraan dalam membangun kesejahteraan perlu adanya manusia, manusia berperan penting dalam pembangunan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi ini, oleh sebab itu maka manusia tidak dapat terlepas oleh tugasnya yaitu sebagai pemimpin.⁵⁹ Firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30 sebagai berikut:

فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*...., h. 102

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqoroh : 30).⁵⁸

Islam telah mengembangkan lingkungan sosial-ekonomi yang memberikan perhatian khusus untuk pengentasan kemiskinan, selain berfokus pada distribusi pendapatan dan kekayaan atau mengurangi kesenjangan. Kemiskinan dalam Islam berkaitan dengan konsep kebutuhan (*maqasidh syariah*). Konsep tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (din), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasab) dan kekayaan (mal). Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan.⁵⁹ Seperti yang terkandung dalam surat QS. An-Nisa ayat : 9 berikut ini:

عَلَيْهِمْ خَافُوا ضَعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوَّالَّذِينَ وَلِيَخْشَ
 سَدِيدًا قَوْلًا وَلَيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*...., h. 6

⁵⁹ Chapra dalam nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, edisi pertama, cetakan ke-1 (Jakarta: kencana, 2012), h. 1

(QS. An-nisa :9).⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan perlu adanya kejujuran dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dan membantu masyarakat yang lemah (miskin).

Aspek Pembangunan Manusia salah satunya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia Ini adalah salah satu tolak pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu Negara atau Wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah di negara itu dapat meningkatkan angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi agar dapat memenuhi standar hidup layak.⁶¹ Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat penduduk. Pemerintah memiliki tugas dalam menyediakan sarana publik untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk.

C. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno yang dimaksud dengan pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Ibid....*, h. 78

⁶¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 220.

dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.⁶² Sedangkan tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak/ belum mendapatkan pekerjaan.⁶³ Dalam Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai.⁶⁴

Pengangguran akan memperkecil pendapatan nasional karena pengangguran tidak memberikan sumbangan pendapatan. Disamping itu, pengangguran bisa mendatangkan masalah sosial di masyarakat seperti tingkat kesejahteraan yang rendah kecemburuan atau kesenjangan sosial; oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan harus senantiasa di perhitungkan sebagai salah satu unsur utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁶⁵

Rumus menghitung tingkat pengangguran:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang nganggur} \times 100\%}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$$

⁶² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 13

⁶³ Prathama Raharja Dan Mandala Manurung, Edisi ke 3, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008) hal. 376

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 89.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 69.

a. Teori Lewis

Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus di peruntukan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

b. Teori Ranis dan Fei

Teori ini dikembangkan oleh dua ahli ekonomi, yaitu Gustav Ranis dan John Fei. Analisis teori Ranis dan Fei dimaksudkan sebagai teori pembangunan untuk Negara yang menghadapi masalah kelebihan jumlah penduduk sehingga menghadapi masalah pengangguran yang serius, dan kekayaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat terbatas.⁶⁶

2. Penyebab Pengangguran

Menjadi pengangguran bukanlah keinginan seseorang, namun keadaanlah yang terkadang memaksa mereka. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran.⁶⁷

- a. Penduduk relatif banyak sedangkan kesempatan kerja atau lapangan kerja relatif rendah
- b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
- c. Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia

⁶⁶ Firi Amalia, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2000-2010". *Econosains* Vol 10, No 2, Agustus 2012, h. 161.

⁶⁷ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014), h. 132

- d. Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi.
- e. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim

3. Macam-Macam Pengangguran

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis yaitu:⁶⁸

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran jenis ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pelamar kerja. Kesulitan temporer ditimbulkan karena proses bertemunya pihak pelamar dengan penyedia pekerjaan yang tentunya perlu waktu untuk sesuai dengan target kerja. Pihak penyedia pekerjaan berharap kualitas kerja yang diperoleh dan sebaliknya pihak pencari kerja perlu waktu untuk dapat memutuskan pilihannya. Pengangguran friksional juga diakibatkan adanya jarak dan Kurangnya informasi. Pelamar pekerjaan tidak mengetahui adanya lowongan kerja dan pihak penyedia kerja kesulitan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan syarat yang diharapkan.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Pengangguran struktural adalah keadaan dimana penganggur yang mencari

⁶⁸*Ibid.*, h 133

lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Peralihan dari pertanian ke industri perlu adanya penyesuaian, yang tentunya perlu mendapat pendidikan sesuai strukturnya.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi karena faktor musim, misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran jenis ini juga tidak menimbulkan banyak masalah. Meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan struktural.

d. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang dihubungkan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu Negara atau keadaan sebuah Negara mengalami resesi. Pada masa resesi tingkat pengangguran siklis meningkat disebabkan beberapa hal, diantaranya orang akan banyak kehilangan pekerjaan meningkat dan diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

Pengangguran menurut lama waktu kerja dapat dibedakan menjadi:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terjadi dimana situasi seseorang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan orang sulit memperoleh pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga orang betul-betul menganggur dan tidak bekerja sama sekali.

b. Setengah Menganggur

Pengangguran terjadi karena situasi dimana orang bekerja, tapi tenaganya kurang termanfaatkan bila diukur dari jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan yang diperoleh. Seorang pekerja lepas tidak ada kepastian waktu dalam mengerjakan pekerjaan.

c. Pengangguran terselubung

Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal.

4. Hubungan pengangguran dengan kemiskinan

Arsyad menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan

adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.⁶⁹

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Adit Agung Prasetyo, menemukan bahwa variabel pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya jika tingkat pengangguran bertambah maka akan menambah tingkat kemiskinan.

5. Pengangguran dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam kerja (*'amal*) menyangkut segala aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itulah pengangguran amat membahayakan diri dan masyarakatnya. Secara moral Islam orang yang demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus mengfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam. Ketika seorang tidak bekerja namun ia masih terus berfikir keras bagaimana bisa memproduktifitaskan dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang produktif maka ia secara moral Islam memenuhi kewajiban kerja dalam Islam dan tidak menanggung dosa pengangguran.⁷⁰ Islam telah

⁶⁹ Arsyad, Lincolyn. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama (Yogyakarta : BPFE, 2010), h. 90.

⁷⁰ Naf'an., h. 137-138

memperingatkan ummatnya agar tidak menganggur, hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi:

﴿مَعَاشًا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا﴾

*Artinya: "Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan".*⁷¹
Menurut Qardhawi pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pengangguran *jabariyah* (terpaksa)

Adalah pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

b. Pengangguran *khiyariyah*

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk bekerja.

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran *jabariyah* perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran *khiyariyah*

⁷¹ Departemen Agama RI, *Ibid....*, h. 582

karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban orang lain.

Penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor sistem sosial dan ekonomi. Adapun penyebab pengangguran dalam Islam, pertama faktor individu terdiri dari kemalasan, cacat/uzur dan rendahnya pendidikan dan keterampilan.⁷² Faktor yang kedua adalah faktor sistem sosial dan ekonomi, faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Sedangkan mekanisme yang dilakukan oleh khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu:⁷³

a. Mekanisme Individu

Dalam mekanisme ini Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. Serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

⁷² Naf'an..., h. 138

⁷³ *Ibid.*, h. 141

kesejahteraan hidup. Firman Allah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja terdapat dalam QS. Al-Mulk ayat: 15

مِنْ وَكُلُوا مَتَاعِهَا فِي فَاَمْشُوا ذُلُولًا اَلْاَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ
النُّشُورُ اِلَيْهِ رَزَقَهُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Imam Ibnu Katsir menyatakan” maksudnya berpergianlah kalian semua ke daerah di bumi manapun yang kalian kehendaki, dan bertebaranlah di berbagai bagiannya untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan dan perdagangan .⁷⁴

b. Mekanisme Sosial Ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidnag sosial yang terkait dengan masalah pengangguran. Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik dibidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun maningkatkan volume perdagangan.⁷⁵ Di sektor

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid.*, h. 142-143

pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan di tanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah. Dalam sektor industri Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.

D. Produk Domestik Reginal Bruto

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah dari keseluruhan produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah selama suatu periode dimana jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan tersebut diukur dengan uang atas harga pasar yang sedang berjalan. Jadi pada umumnya perhitungan pendapatan regional didasarkan pada harga berlaku, inflasi belum dielemisir dalam perhitungannya, sehingga kenaikan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dari waktu ke waktu belum tentu merupakan kenaikan riil. Oleh sebab itu perhitungan pendapatan regional juga dapat dihitung berdasarkan harga konstan (harga tahun dasar) yang berguna melihat kenaikan atau penurunan secara riil dari kenaikan atau

penurunan perekonomian suatu daerah.⁷⁶ Harga konstan artinya harga produk di dasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya di sebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga di anggap tetap (konstan).⁷⁷ Sedangkan menurut BPS PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar konsep barang artinya PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik) sehingga hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik.⁷⁸ Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Komponen pendapatan nasional terdiri dari beberapa sektor yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalan, industri, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, Bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah dan pertahanan, jasa-jasa.

⁷⁶ M. Alhudori..., h. 118

⁷⁷ Robinson tarigan, *Ekonomi Regional, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 21.

⁷⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 27

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan kemiskinan

Menurut Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.⁷⁹

Selain berdasarkan teori di atas, pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridzky Giovanni. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB memberikan hasil negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PDRB sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan jumlah penduduk miskin berkurang.

3. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut

⁷⁹ Ridzky Giovanni..., h. 30

oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ السَّمَاءُ يُرْسِلُ ۖ غَفَارًا ۖ إِنَّهُ رَبُّكُمْ أَسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ
أَنْهَرَا لَكُمْ وَتَجْعَلْ جَنَّتْ لَكُمْ وَتَجْعَلْ وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ وَيُمْدِدْكُمْ ۖ مَذَرَارًا



Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai’”.⁸⁰

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan begitu mampu memperbaiki keadaan seseorang menjadi lebih baik.

Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya Cet. Ke-10*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitul maal (*national treasury*).⁸¹ Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu : nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut.⁸² Selain itu konsep Islam juga mendorong pada upaya peningkatan sumber daya, bukan hanya menghabiskan sumber daya tetapi untuk dialokasikan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi dapat berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu Negara. Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:⁸³

- a. Sumber daya yang dapat diinvestasikan
- b. Sumber daya manusia dan entrepreneurship
- c. Teknologi dan inovasi

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. Al-falah dalam

⁸¹ A. Adiwarman karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 186

⁸² *Ibid.*, h. 193

⁸³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti..., h. 23

pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani di mana roh merupakan esensi manusia. Maka pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan.⁸⁴ Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁸⁵

E. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridzky Giovanni dengan judul “**Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016**”. Variabel yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen ada tiga variabel yaitu PDRB, Pengangguran, dan

⁸⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok : Kencana, 2006), h. 195

⁸⁵ *Ibid.*, h. 197

Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan regresi data panel. hasil analisis menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Penelitian oleh Prima Sukmaraga (2011) dengan judul “ **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah.**” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa setiap peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada peningkatan produktifitas kerja dari penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan pendapatan dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Penelitian Denni Setiawan Jayadi dan Aloysius Gunadi Bata dengan judul “**Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia 2004-2012**”. Variabel yang digunakan yaitu penduduk miskin sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode analisis yang digunakan regresi data panel dengan pendekatan model *Fixed Effect* dengan bantuan software Eviews 8.1. hasil dari penelitian ini bahwa pada tahun 2004-2012 sebagai akibat dari peningkatan permintaan akan komoditas pertambangan memiliki pengaruh yang besar terhadap

pemberantasan kemiskinan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Selanjutnya penelitian oleh Sussy susanti yang berjudul **“Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”**. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan pendekatan model *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel PDRB dan pengangguran secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel IPM secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian oleh M. Alhudori dengan judul **“Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi”**. Metode analisis yang digunakan analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen (IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu penduduk miskin. Sedangkan secara parsial variabel IPM dan Jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan dengan jumlah penduduk miskin. Variabel PDRB secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan jumlah penduduk miskin.

Penelitian Elida Madona Siburian yang berjudul **“Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi**

Sumatera Utara”. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Hasil penelitian yaitu bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan secara statistik tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

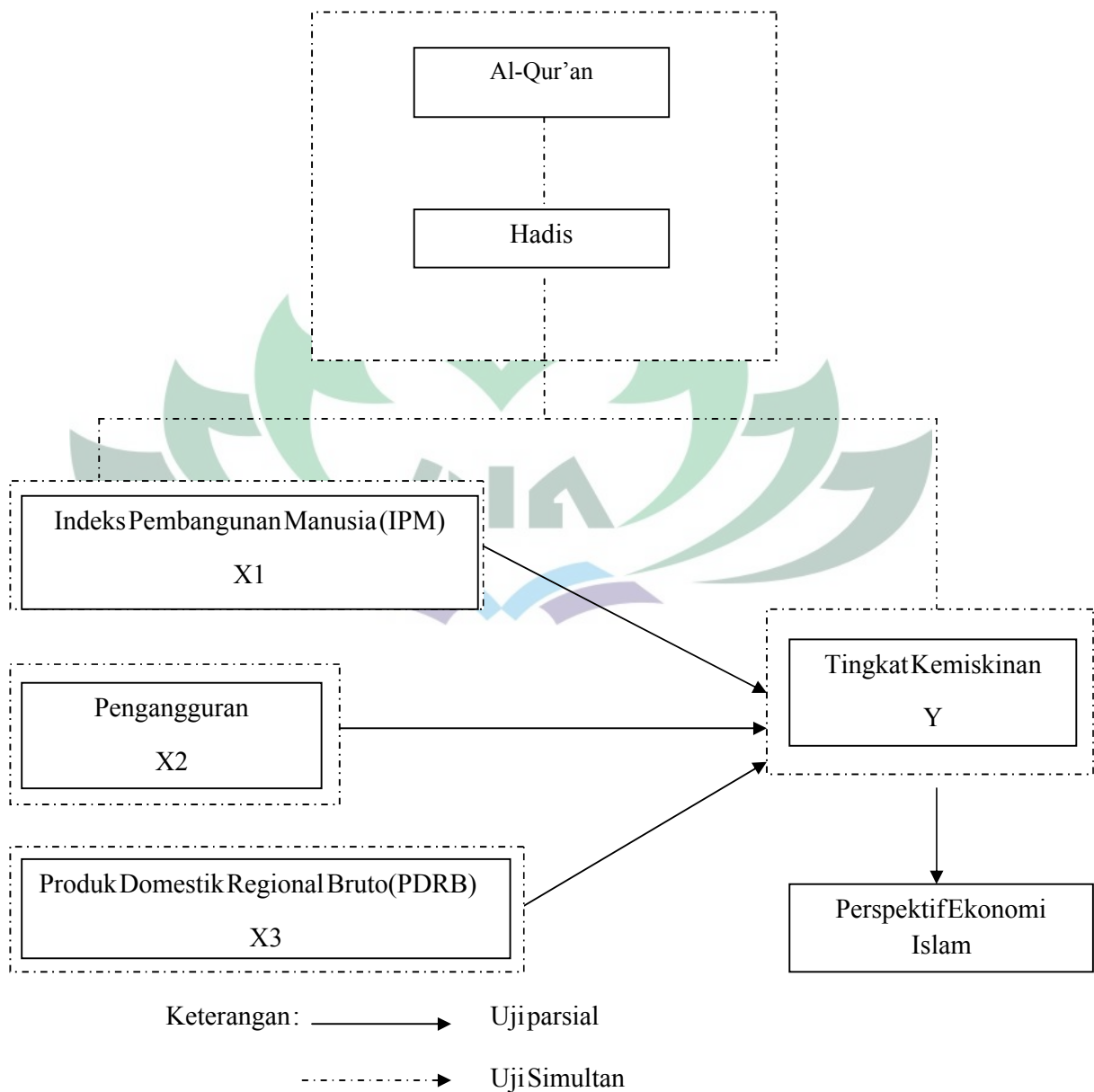
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diketahui beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan lebih dari Dua variabel bebas. Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan Pulau Sumatera sebagai objek penelitian, sementara penelitian terdahulu menggunakan Provinsi dan Kabupaten sebagai objek penelitian. Selain itu terdapat perbedaan waktu penelitian, penggabungan hasil penelitian, serta secara keseluruhan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan atau menjelaskan dalam pandangan perspektif Ekonomi Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan oleh Nurkse menerangkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga indikator utama yang kemudian dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Regional

Bruto terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera sebagai variabel terikat. Berdasarkan teori tersebut di atas maka peneliti menentukan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1.3
Skemakerangka Pemikiran



Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada suatu tahun tertentu, masyarakat akan meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Dalam setiap tahun jumlah tenaga kerja akan bertambah karena adanya golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan menurun. Menurunnya tingkat pengangguran juga akan menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang selama ini tidak mampu bekerja dikarenakan rendahnya produktivitas kerja yang dimiliki. Rendahnya IPM dilihat dari tingkat produktivitas sumber daya penduduk miskin dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari tenaga kerja tersebut, sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima karena tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup maka akan terjadi keterbelakangan. Dalam Islam Pertumbuhan ekonomi harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek rohaniyah yaitu spiritual dan moral. karna dengan keseimbangan aspek tersebut dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini. Maka dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba menguraikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1), pengangguran (X2), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X3) terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y). Sehingga dari kerangka pemikiran diatas dapat menjadi hipotesis penelitian.

G. Hipotesis

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Schultz menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya Sehingga produktifitas juga akan meningkat.

Sedangkan Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prima Sukmaraga. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa setiap peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada

peningkatan produktifitas kerja dari penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan pendapatan dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

H1 :Indeks Pembangunan Manusia (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y)Provinsi di Pulau Sumatera Tahun2011-2018

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Lincoln Arsyad menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik, dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan.⁸⁶

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agung Prasetyo, menemukan bahwa variabel pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya jika tingkat pengangguran bertambah maka akan menambah tingkat kemiskinan.

⁸⁶ Sadono sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Kencana, 2006).....,h. 69.

H2: Pengangguran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y) Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2018

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga akan mengurangi kemiskinan. Maka dampak dari pertumbuhan ekonomi ini secara teori mampu mengurangi angka kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto dilihat sebagai salah satu faktor terpenting untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. PDRB sebagai nilai total pendapatan di berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, perdagangan, pengangkutan, bank dan jasa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridzky Giovanni. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB memberikan hasil negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PDRB sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan jumlah penduduk miskin berkurang.

H3 :Produk Domestik Regional Bruto (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun2011-2018

4. Pengaruh IPM, Pengangguran, dan PDRB terhadap tingkat Kemiskinan Secara Simultan

Robert Chambers mengemukakan pandangannya tentang teori kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Menurutnya, kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.⁸⁷

Variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti tingkat Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor atau tiga variabel tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkatkan produktivitas kerja manusia sehingga mereka mampu berinovasi untuk menciptakan usaha mandiri atau perusahaan memiliki pendapatan yang lebih sehingga mampu mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian berbagai

⁸⁷Muana Nanga dkk..., h. 7

perusahaan akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, hal ini berarti pengangguran akan menurun. Menurunnya angka pengangguran akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita.

H4 : IPM (X1), Pengangguran (X2), dan PDRB (X3) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2018



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1988. *Ulama dan Penguasa di Masa Kejayaan dan Kemunduran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Alhudori, Muhammad. 2017. Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Jurnal economics and Business, Vol. 1, No. 1*.
- Andy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014).
- Badan Pusat Statistik, tersedia di <https://www.Bps.go.id/subjek/view/id/52>. diunduh tanggal 5 juli 2019, pukul 21:14 WIB
- Christina Usмалиadanti, “Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sekor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”. (Disertai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke 10*, Jakarta : Darus Sunnah, 2011.
- Denni setiawan Jayadi, Aloysius Gunadi Bata. 2016. Peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2004 – 2012. *ISSN: 0852-1875 MODUS Vol.28 (1): 87–99*
- Efendi, Jaenal.”Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Disertai Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2005.

- Fadlillah, Nurul. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Eko-Regional*, Vol.11, No.1.
- Firi Amalia, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2000-2010”. *Econosains* Vol10, No2, Agustus 2012.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giovanni Ridzky. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, Vol7, No. 1.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ilmi, Syaiful. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, al-maslahah*: Vol.13 No.1 April 2017
- Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman . 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Kuncoro Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mujahidin, Akhmad. *Pengentasan Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi Islam, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008.
- Mustofa Edwin Nasution dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Depok : Kencana
- M.L Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ningrum Setya Shinta. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2.
- Nurul Huda dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Prathama Raharja Dan Mandala Manurung. 2008. Edisi ke 3, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Riyadi, dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015* . Jakarta: Badan Pusat Statistik BPS.
- Setiawan, M.Bhakti dkk. 2013. Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economika, Vol9, No. 1*.
- Subagyo, Joko. 2011 *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan, proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : rajawali pers.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukmagara, Prima. 2011. *Analisis Pengaruh IPM, PDRB per kapita, Dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi UNDIP Semarang.
- Susanti, Sussy. 2013. Pengaruh PDRB, Pengangguran dan IPM Terhadap kemiskinan di Jawa Barat Dengan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif Vol 9, No. 1*.
- Tambunan Tulus. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta : LP3ES.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Teguh, muhammad. 2005. *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada